

Pendidikan Agama dan UU Sisdiknas Tahun 2003

Oleh AF. Djunaedi

Dosen FIAI UII Yogyakarta

Pendahuluan

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) atau UU Nomor 20 Tahun 2003 yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 18 Juli 2003 lalu, merupakan peluang besar sekaligus tantangan bagi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agama, yang menyimpan banyak permasalahan. Penegasan tentang pentingnya pendidikan agama, harus berkorelasi dengan munculnya solusi-solusi kongkrit atas persoalan kebangsaan dan kemanusiaan kita saat ini. Hal ini mengacu pada kenyataan bahwa meski agama-agama mempromosikan kejujuran, ketertiban, keadilan, bahkan keharusan untuk membebaskan orang-orang papa dan tertindas, ternyata yang tampil dari wajah masyarakat kita nyaris berlawanan dengan itu.

Tampilan wajah agama itu tidak terlepas dari model pendidikan agama yang dikembangkan selama ini. Pendidikan agama kita selama ini masih berpusat pada hal-hal yang bersifat simbolik, ritualistik, dan legal-formalistik. Kita bukan hanya cenderung merasa puas dengan mengenakan simbol-simbol keagamaan, namun juga sering melupakan kaitan erat antara ritualitas dengan kesalehan sosial yang harus

terbangun di atasnya. Dampaknya, berbagai persoalan riil kemanusiaan dan kebangsaan yang ada di tengah masyarakat sering terabaikan (Suyanto dan *Djihad Hisyam*, 2000:109)

Dampak tersebut diperparah dengan kenyataan lain bahwa sistem pendidikan kita secara umum lebih cenderung bertumpu pada penggarapan *ranah kognitif* (intelektual) dan *afektif* (emosional) saja, atau hanya salah satunya saja. Akibatnya, para penganut agama di negeri ini memiliki pengetahuan dan diikuti dengan kesadaran yang tercipta karena adanya pengetahuan intelektual itu. Bahkan terkadang sudah sampai memiliki keinginan untuk berbuat karena adanya dorongan emosional, tetapi tidak dapat benar-benar mewujudkannya dalam tindakan nyata, karena ranah psikomotorik tidak tersentuh dalam pendidikannya. Hal ini terlihat dengan jelas di tengah kehidupan sosial sebagai akibat belum tergarap secara menyatu dalam pendidikan agama yang ada.

Di samping metode pengajaran yang mengandung kelemahan, juga pendidikan agama sering dihadapkan *vis a vis* modernitas dan wacana yang dihasilkan di dalamnya. Melalui berbagai terminologi, agama yang diajarkan sering dipertentangkan dengan nilai demokrasi, hak asasi

manusia, pluralisme, globalisasi, nasionalisme, sosialisme, dan sebagainya. Dengan berbagai alasan, terminologi itu dianggap sebagai produk barat, dan oleh karenanya harus ditolak. Sementara sisi spirit dan semangat yang mendasari terminologi itu tidak diambil sebagai nilai yang juga diajarkan oleh agama. Bukankah dialog kemanusiaan, realitas kemajemukan, persaingan dalam kebaikan, cinta tanah air, dan kepedulian sosial juga diajarkan dalam agama?

Dari proses ini, produk yang dihasilkan pendidikan agama bahkan sering berwajah garang, eksklusif, tidak toleran, bahkan cenderung antipati terhadap perubahan dan kemajuan yang dicapai oleh peradaban modern saat ini. Berbagai pengeboman yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh oknum pemeluk agama adalah salah satu contoh yang dapat kita saksikan.

Persoalan lain yang belum diperhatikan dalam pendidikan agama adalah masalah lingkungan hidup. Dalam konsepsi Islam misalnya, pemahaman umum tentang eksistensi manusia adalah sebagai khalifah yang diberi kewenangan untuk mengeksplorasi bumi demi kesejahteraannya. Namun, karena pengajarannya tidak tuntas, maka manusia dipahami sebagai penguasa bumi, bukan sebagai pemelihara dan penjaga. Padahal, wewenang ini sesungguhnya menyatu dengan kewajiban manusia untuk memelihara kelestarian bumi dan menjaga keberlangsungannya untuk generasi yang akan datang.

Namun demikian, walaupun Undang-undang Sisdiknas telah 9 bulan dsahkan, pemerintah belum

melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh baik Undang-Undang Sisdiknasnya itu sendiri, maupun Peraturan pemerintah yang menyangkut pelaksanaan di lapangan. Akibatnya, lembaga-lembaga pendidikan belum bisa mengimplementasikan UU tersebut dalam kehidupan persekolah yang ada. Hal ini terbukti, bahwa lembaga-lembaga pendidikan masih tidak "menginginkan" guru agama dari luar lembaga mereka dengan alasan bahwa guru agama harus sesuai dengan visi dan misi lembaga.

Oleh sebab itu, bahwa masalah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional adalah ada pada dataran operasional, yang mungkin implementasinya akan sangat sulit jika tidak adanya peranan pemerintah, terutama pemerintah daerah secara optimal. Dalam hal ini, peranan pemerintah dalam menjamin pelaksanaan UU Sistem Pendidikan Nasional ini sangat penting sekali dan Undang-undang tersebut bukan hanya disosialisasikan tanpa implementasi yang jelas. Selain itu juga seharusnya ada koordinasi antara semua komponen atau instansi yang terkait dengan lembaga-lembaga pendidikan di seluruh Indonesia sehingga masing-masing lembaga akan merasa mudah untuk mengimplimentasikannya di lapangan.

Karena itulah, lahirnya UU Sisdiknas yang baru ini, antara lain bertujuan untuk mengakhiri krisis moral anak didik melalui pendidikan agama di sekolah, dengan lebih mengedepankan pengajaran dan pendidikan agama yang kritis, hidup, dan bermakna. Selama ini, di satuan

pendidikan swasta tertentu tidak memberikan pendidikan agama, khususnya Islam bagi anak didik yang beragama Islam. Untuk ke depan, hal ini harus ada dan hanya bisa dilakukan oleh guru yang seagama.

Lahirnya anak didik yang cerdas, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, dengan haqqul yakin, tidak satu pun orangtua yang menolak hal itu. Mereka pasti akan menyambut baik produk seperti yang juga diamanatkan dalam konstitusi tersebut. Apalagi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kata-kata iman dan takwa telah ada, dalam kaitan mencerdaskan kehidupan bangsa.

UU Sisdiknas yang telah disahkan pada bulan Juli 2003, perlu segera dikeluarkan PP untuk bisa dilaksanakan segera. Bagi kalangan yang dulu pernah menolak, mereka harus menerima kenyataan dan legowo bahwa tidak satu pun klausul dalam UU tersebut yang melanggar prinsip-prinsip HAM, demokrasi, dan pluralisme. sebaiknya masalah ini secara arif dan dewasa, dengan tetap menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa (A. Syafi'i Ma'arif, Republika, 2003).

Sementara itu, bagi kalangan muslim yang selama ini diakui bahwa kualitas pendidikan yang mereka selenggarakan masih perlu ditingkatkan mutunya. Lembaga pendidikan yang bermutu adalah salah satu yang dapat mengatasi krisis pendidikan bangsa kita. Kita amat prihatin bahwa kualitas pendidikan di Indonesia terus merosot, bahkan kabar terakhir menyebutkan peringkat pendidikan kita di bawah Vietnam, negara yang dari sudut apa pun beberapa waktu lalu masih jauh di

bawah Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut, dua hal yang kini paling mendesak dicari solusinya yaitu masalah kualitas guru dan metodologi pengajaran dan pendidikan. Selama ini, kedua hal tersebut dinilai menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang diselenggarakan kalangan umat Islam. Untuk itulah, dua masalah tersebut mesti mendapat perhatian serius (Azyumardi Azra., 1999:119).

Redefinisi Pengertian Pendidikan Agama

Pendidikan agama, seperti diungkapkan Nurcholish Madjid, adalah pendidikan untuk pertumbuhan total seorang anak didik. Pendidikan agama tidak benar jika dibatasi hanya kepada pengertian-pengertiannya yang konvensional dalam masyarakat. Meskipun pengertian pendidikan agama yang dikenal dalam masyarakat itu tidak seluruhnya salah, jelas sebagian besarnya adalah baik dan perlu dipertahankan. Namun tidak dapat dibantah lagi bahwa pengertian itu harus disempurnakan (Nurcholish Madjid, 2000:93).

Apa yang disampaikan oleh Cak Nur di atas, pada dasarnya adalah dikembalikan kepada makna agama itu sendiri secara lebih proporsional. Agama bukanlah seperti yang difahamkan secara sempit oleh sementara orang yang hanya berkuat dalam masalah tindakan-tindakan ritual seperti salat dan membaca do'a. Itu secara otomatis akan memberikan interpretasi yang berbeda pula terhadap pendidikan agama. Tidak heran jika orang tua sudah merasa

berhasil dan purna tugas setelah melihat anak-anaknya sudah salat dan sedikit bisa membaca Al-Qur'an dan do'a. Mereka setelah itu tidak lagi mengontrol apakah nilai-nilai substansial dari agama telah terintegrasi dalam diri mereka dan dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kalau sudah demikian siapa yang bisa menjamin anak tersebut tidak mengambil sandal yang bagus setelah selesai salat tarawih atau apa bisa dia menolak tawaran untuk menengguk minuman keras dari sesama teman-teman bermainnya. Artinya, agama lebih dari itu, yaitu keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridha Allah.

Dengan demikian, agama dipahami meliputi keseluruhan tingkah laku manusia dalam hidup ini, yang tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi luhur (ber-akhlaqul karimah). Ini dibangun atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan pertanggungjawab pribadi di hari kemudian. Hal tersebut hanya dapat diwujudkan melalui suatu proses yang disebut dengan pendidikan agama bagi anak.

Solusi Atas Pendidikan Agama

Formulasi model pendidikan agama harus diselaraskan dengan budaya baru masyarakat modern, baik saat ini dan masa mendatang. Melalui penelitiannya, *Dön Tapscott* yang dikutip *HAR Tilaar*, mengidentifikasi suatu budaya baru dari apa yang disebutnya sebagai *N-Gen* (The Net-Generation), yaitu generasi abad komputer. Tapscott menyebut ada 10 ciri budaya dari *N-Gen*, yaitu

kecenderungan untuk berpikir merdeka, keterbukaan emosional dan intelektual, budaya inklusifisme, kebebasan untuk menyatakan sesuatu, budaya inovasi, budaya kematangan, budaya menyelidik (investigasi), kekinian (immediacy), kepekaan terhadap pengaruh korporasi, dan budaya otentik. Dengan demikian, generasi yang akan datang adalah generasi yang terbuka.

Dengan ciri sebagai generasi terbuka ini, *HAR Tilaar* menawarkan solusi penyemaian kreativitas dalam pengembangan pendidikan. Dalam budaya baru dari *N-Gen*, tidak ada tempat lagi bagi penyumbatan kreativitas. Hanya kemampuan kreativitas yang dapat membawa seseorang untuk mengembara dalam lautan informasi dan pengetahuan agama. Dengan sendirinya proses pembelajaran agama yang membunuh kreativitas atau memasung pengembangan intelektual peserta didik tidak ada tempatnya di dalam *N-Gen*. Dari model ini diharapkan akan lahir inovasi-inovasi dan pemahaman baru tentang agama yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*HAR Tilaar*, 1999:105).

Di dalam pengembangan kreativitas inilah, proses belajar yang disebut *broadcast learning* harus diganti dengan *interactive learning*. Guru agama tidak lagi sebagai pembaca berita, namun berubah menjadi fasilitator. Pendidikan agama tidak lagi sebagai sesuatu yang membosankan, namun menjadi sesuatu yang menggembirakan. Materi pendidikan agama disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Belajar tidak lagi dianggap sebagai media untuk menyerap bahan

pelajaran, namun belajar bagaimana belajar (*learning to learn*). Pusat pendidikan bukan lagi guru, melainkan peserta didik yang dibentuk tidak dengan instruksi, namun dengan konstruksi dan *discovery* (menemukan). Akhirnya, pendidikan agama tidak harus selalu dilakukan secara linier dan berurutan (*sequential/serial*), tapi dapat ditempuh melalui hiper media.

Model pembelajaran ini tetap harus diperkaya dengan inseminasi secara terus-menerus dengan kecerdasan spiritual rasionalisme. Spiritual rasionalisme adalah pengakuan terhadap peranan rasio dalam peningkatan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan material maupun kehidupan spiritual, tanpa menghilangkan kenyataan bahwa teknologi telah mengubah kehidupan manusia menuju ke arah kehidupan yang lebih berkualitas. Tantangan ini harus dilakukan dengan mengubah sistem pendidikan agama agar berorientasi ke masa depan (*future oriented*), tidak lagi hanya berorientasi ke masa silam sebagaimana kenyataan yang ada selama ini.

Untuk melakukan usaha tersebut, pendidikan agama harus dipahami secara menyeluruh. Dalam kaitan ini, Ali Asraf menyebut bahwa dalam pendidikan, manusia dipahami sebagai ciptaan ilahi. Ilmu pengetahuan yang telah terakumulasi di dalam peradaban umat manusia merupakan sumber kemajuan dan pengembangan fitrah manusia dikarenakan kenyataan bahwa manusia memiliki kemampuan intelektual. Dengan demikian, seluruh aspek kemampuan manusia perlu

dikembangkan secara terintegrasi. Pengembangan itu hanya dapat dilakukan jika manusia selalu dilihat dalam tatanan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*hablun min Allah*) dan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya (*hablun min al nas*).

Revitalisasi dan Reposisi Pendidikan Agama dalam Sisdiknas; Pendidikan Agama Di Keluarga

Diskursus tentang pendidikan anak dalam keluarga bagaimanapun tetap menjadi masalah yang menarik untuk diamati dan dikaji, terutama oleh para praktisi pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, keluarga merupakan awal di mana seorang anak tumbuh dan berkembang atau meminjam pendapat Hasan Langgulung yang dikutip oleh Chabib Thoha dalam Kapita Selekta Pendidikan Islam, bahwa keluarga adalah satu elemen terkecil dalam masyarakat yang merupakan institusi sosial terpenting dan unit sosial yang utama melalui individu-individu disiapkan nilai-nilai hidup dan kebudayaan yang utama (*Chabib Thaha*, 1996:109)

Dasar pendidikan yang diberikan dalam keluarga paling tidak, akan menjadi awal bagi titik tolak (*the first step*) anak-anak kita. Melihat urgensi pendidikan anak sejak dini dalam sebuah keluarga, tidak salah jika Buckminster Fuller seperti dikutip oleh Gordon Dryden dan Jeannette Vos dalam *The Learning Revolution* mengatakan bahwa setiap anak itu pada dasarnya terlahir jenius, tetapi kita memupuskan kejeniusan mereka dalam enam bulan pertama (*Gordon Dryden & Jeannette Vos*, 2000:24).

Artinya tidak ada alasan yang cukup logis untuk tidak memulai pendidikan mereka sejak mereka kecil, ini sesuai dengan semangat yang menyatakan bahwa proses pendidikan itu sendiri dimulai sejak berada dalam ayunan (kecil) sampai ke liang lahat (*uthlubul 'ilm minal mahdi ilal lahd: al-Hadits*).

Permasalahan yang perlu diajukan adalah, bagaimanakah pendidikan agama dalam keluarga, serta langkah-langkah apa yang perlu ditempuh untuk memperbaiki pendidikan agama dalam keluarga?. Hal terpenting yang perlu kita kaji adalah bagaimana cara pendidikan keluarga dapat berlangsung dengan baik sehingga mampu menumbuhkan perkembangan kepribadian anak menjadi manusia dewasa yang memiliki sikap positif terhadap agama, kepribadian yang kuat dan mandiri, potensi jasmani dan rohani serta intelektual yang berkembang secara optimal (Al-Abrasyi, 1969:205).

Satu hal yang barangkali sudah menjadi pengetahuan publik adalah bahwa untuk konteks ke-Indonesiaan, orangtua lebih cenderung untuk menyerahkan pendidikan agama anaknya secara "sertamerta" kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam atau guru-guru privat agama Islam. Kalau ditelusuri lebih dalam ternyata hal itu berangkat dari 'ketidakmampuan' (atau mungkin ketidakmauan) orang tua untuk mendidik anaknya sendiri.

Artinya orang tua merasa tidak memiliki kompetensi untuk memberikan pendidikan agama bagi anak mereka sendiri. Namun bisa jadi juga karena keengganan dan ketidakmauan mereka untuk mendidik anak mereka sendiri. Kasus seperti ini

banyak terjadi pada anak-anak yang orang tuanya justru adalah para pendidik Agama Islam (guru, dosen, da'i) yang sibuk dengan aktifitasnya sendiri.

Fenomena seperti di atas akan benar-benar dapat menyita perhatian kita manakala kita mau peduli terhadap apa yang pernah kita baca dan jumpai bahwa faktor keluarga (selain miliu) lebih dominan dalam mencetak kepribadian anak. Anak-anak yang asosial, nakal, dan pada gilirannya menjadi musuh masyarakat adalah berangkat dari adanya pengabaian pendidikan agamanya dari dalam keluarganya sendiri. Dengan demikian bahwa pendidikan sebenarnya tidak mengenal batas, ruang dan waktu, di mana saja bisa dilakukan proses pendidikan sebagai sarana pembinaan kepribadian peserta didik atau anak.

Rekomendasi; Pendidikan Agama Pluralis dan Multikultural ; Sebuah Solusi Polemik

Pendidikan agama yang selama ini dijalankan, faktanya sering menimbulkan fanatisme keberagamaan dan penciptaan ideologi klaim kebenaran. Mengapa? Karena praktik pendidikan agama kurang menyentuh aspek realitas sosial, yang sebenarnya juga merupakan garapan agama. Dua peran dan fungsi agama itu adalah ritual dan sosial. Dengan demikian, model pendidikan agama gaya lama yang cenderung eksklusif, dogmatis, kembali ke masa lalu yang kelabu, dan tidak menyentuh aspek moralitas, perlu di dekonstruksi atau dibongkar. Kemudian, dimunculkan model pendidikan yang menghargai kemanusiaan, membebaskan dari

penindasan, memupuk persaudaraan, dan menekankan kebaikan serta kesejahteraan bersama.

Model pendidikan agama yang cocok untuk Indonesia di masa depan tentu saja harus digali dari aspek sosiologis, antropologis, dan teologis masyarakatnya. Jika kita perhatikan dengan saksama, bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang unik; merupakan kumpulan dari berbagai macam suku dan pemeluk agama yang berlainan satu dengan yang lainnya. Keanekaragaman (pluralitas) kultural dan religius ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna saling membantu, berlomba berbuat kebajikan, dan menciptakan kebaikan serta harmoni kehidupan (Ahmad Fuad Fanani, *Kompas*, 26/4/2002)

Oleh karenanya, model pendidikan agama di Indonesia yang perlu dikembangkan ke depan adalah model pluralis-multikultur. Pendidikan agama pluralis-multikultur adalah model pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai moral seperti kasih sayang, cinta sesama, tolong menolong, toleransi, menghargai keragaman dan perbedaan pendapat, dan sikap-sikap lain yang menjunjung kemanusiaan. Pendidikan yang menjunjung tinggi pluralisme, multikultur, dan menghargai kemanusiaan di atas, tidaklah harus kita biarkan berhenti pada tingkat teori atau wacana.

Semua itu perlu segera disusun menjadi agenda aksi yang nyata dan membebaskan. Karena, sudah menjadi tugas seorang intelektual untuk terjun ke lapangan guna membebaskan mereka yang terimpit kemiskinan dan penindasan dari para

penguasa. Seorang pendidik dan anak didik haruslah juga seorang *rausyan fikr* dalam bahasa Ali Syari'ati, atau seorang intelektual organik-dalam bahasa Antonio Gramsci, yang tidak hanya bersibuk diri dengan kajian intelektual semata. Pluralisme keberagamaan yang dipupuk lewat aspek pendidikan perlu segera dikawinkan dengan teologi pembebasan guna melakukan transformasi sosial.

Hal itu bisa dilakukan, misalnya melalui tahapan pengembangan paham toleransi, selanjutnya melakukan dialog antaragama, dan kemudian melakukan kerja sama lewat aksi nyata. Wujud kerja sama itu misalnya bisa dilakukan dengan membantu korban banjir, advokasi korban kekerasan, melakukan santunan pendidikan, memberikan modal usaha, atau bersama-sama memprotes ketidakadilan pemerintahan yang zalim.

Dalam hal ini, ide pendidikan untuk pembebasan yang digulirkan oleh Paulo Freire menemukan relevansinya. Pendidikan model ini menekankan pada transformasi pengetahuan yang memihak pada kemanusiaan universal. (Politik Pendidikan, 2001). Jika pada pendidikan gaya bank (yang selama ini banyak dijalankan) murid hanya difungsikan sebagai obyek yang kosong dan tidak tahu apa-apa. Sedangkan seorang guru melakukan tugasnya hanya sekadar menggugurkan kewajiban dan menyampaikan apa yang diketahuinya. Jadi, kebebasan berpikir dan pengembangan sikap kritis tidak mendapatkan porsi sama sekali. Selain itu, guru kurang mempunyai tanggungjawab moral dan

sosial terhadap masa depan anak didiknya. Dalam pendidikan untuk pembebasan, murid dan guru terlebih dahulu memahami realitas atau sadar pada keadaan sekitarnya. Misalnya, perlu adanya kesadaran tentang multikultural dan multireligius di Indonesia, namun karena pemerintah yang tidak beradab, keadaan menjadi kacau balau.

Langkah berikutnya adalah penanaman kesadaran bahwa sudah menjadi tugas manusia untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mengembangkan nilai-nilai perenial agama. Kemudian mereka bersama-sama melakukan tindakan untuk mewujudkan aksi kemanusiaan. Namun tahapan ini tidak hanya berhenti begitu saja, karena setelah terjun ke lapangan, mereka harus mengevaluasi dan mengkaji teori lagi, untuk kemudian melakukan aksi yang lebih baik. Dengan begitu, lingkaran kejadian-refleksi-aksi dan guru-murid-realitas, adalah sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan dalam dunia pendidikan.

Pendidikan agama pluralis-multikultural dan liberatif sangat urgen untuk diwujudkan, mengingat selama ini di Indonesia masih kurang perwujudan hubungan antar umat beragama yang harmonis dan membebaskan. Oleh karena itu perlu ditanamkan sikap dan pemikiran yang dewasa dalam menghadapi perbedaan agama dan perilaku keagamaan. Pluralitas agama justru harus terus dipupuk sebagai ajang koreksi dan cermin diri dalam bergaul dengan manusia.

Selanjutnya melakukan transformasi atau pembebasan sosial

bersama. Tentunya untuk menentang ketidakadilan, status quo, monopoli, dan segala bentuk kejahatan kemanusiaan lainnya. Oleh itu, untuk menghindari polemik yang berkepanjangan maka hemat penulis sudah selayaknya pendidikan agama pluralis dan multikultural dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam sistem pendidikan nasional yang baru (UU nomor 20 tahun 2003) untuk lebih menguatkan dan mereposisi sistem pendidikan yang selama ini masih terbelenggu karena banyaknya faktor kepentingan yang berperan dari para pengambil keputusan.***

Kepustakaan

Abror, Abdul Rachman. 1993. *Psikologi Pendidikan*. Tiara Wacana, Yogyakarta

Adian Husaini, Penyesatan Opini, Al-Islam - Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia

Ahmad Fuad Fanani, Pendidikan Pluralis, Kompas, 26/4/2002

Al-Abrasyi, Muhammad Athiyah. 1969. *Al-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Falasifatuha*. Dar Al-Fikr, Lebanon

Al-Qussy, Abdul Aziz. 1975. Terj. Zakiah Dradjat *Pokok-pokok Kesehatan Mental/Jiwa*. Bulan Bintang, Jakarta

Azra, Azyumardi. 1999. *Esei-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hal.119

- Chabib Thaha (1996) dalam *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) hal. 109
- Gordon Dryden & Jeannette Vos (2000) dalam *The Learning Revolution: To Change the Way the World Learns* terj. Word++ Translation Service *Revolusi Cara Belajar: Keajaiban Pikiran* bag.1 (Bandung: Kaifa)
- Hr. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*, 1999, Rosda Karya, Bandung,
- Nurcholish Madjid (2000) *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat* (Paramadina: Jakarta)
- Suyanto, & Djihad Hisyam. 2000. *Refleksi Dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia Memasuki Milenium III*. Adicita Karya Nusa, Yogyakarta
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *harapan Pada RUU Sisdiknas*, Harian Umum Republika, 2003